

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG INGATKAN: MANIPULASI HASIL PSU DIANCAM SANKSI BERAT

BANDAR LAMPUNG, 01 Juni 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung terus memperkuat langkah mitigasi pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai bagian dari program prioritas nasional Bawaslu tahun 2025. Program ini merupakan upaya strategis untuk memastikan daftar pemilih yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan mendatang benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.

Langkah pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dan terukur terhadap proses pembaruan data pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebagai langkah pencegahan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan PDPB, Bawaslu Provinsi Lampung melakukan berbagai inisiatif strategis. Beberapa di antaranya meliputi konsolidasi data hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan terakhir, serta penyusunan peta wilayah rawan PDPB berdasarkan variabel hak pilih. Pemetaan ini penting untuk mengidentifikasi area yang berpotensi mengalami permasalahan seperti pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), atau warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih.



Selain itu, koordinasi intensif dengan KPU Provinsi Lampung dan dinas/instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), lembaga

pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum juga dilakukan untuk memperkuat validitas data kependudukan.

Bawaslu Lampung juga membuka posko pengaduan masyarakat baik secara offline di kantor Bawaslu maupun secara online melalui kanal digital resmi. Posko ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan permasalahan data pemilih, seperti pemilih yang tidak terdaftar, data ganda, atau pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum dalam daftar.

Selain melakukan publikasi hasil pengawasan PDPB, Bawaslu Provinsi juga aktif melakukan supervisi dan monitoring ke jajaran kabupaten/kota untuk memastikan seluruh langkah pencegahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu melakukan pendekatan yang lebih operasional dan berbasis wilayah. Upaya yang dilakukan antara lain inventarisasi data hasil pengawasan Pemilu sebelumnya, penyusunan peta wilayah rawan PDPB, serta koordinasi dengan berbagai pihak seperti KPU Kabupaten/Kota, Disdukcapil, Pengadilan Negeri, Lapas/Rutan, TNI/Polri, hingga pemerintah kecamatan dan desa.

Koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci utama agar seluruh pergerakan data kependudukan, baik penambahan pemilih baru, pemilih pindah domisili, hingga penghapusan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, dapat terpantau dengan baik.



Bawaslu Kabupaten/Kota juga diwajibkan untuk membuka posko pengaduan masyarakat dan melaksanakan kerja sama dengan lembaga atau pihak terkait dalam rangka pengawasan PDPB. Tak hanya itu, jajaran Bawaslu di daerah juga diimbau untuk secara aktif menyampaikan imbauan tertulis kepada KPU setempat agar pelaksanaan PDPB berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawaslu Lampung menilai bahwa keberhasilan PDPB tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi prinsip utama dalam proses ini.

Melalui publikasi hasil pengawasan, masyarakat dapat memantau perkembangan pelaksanaan PDPB dan turut memberikan masukan apabila menemukan adanya kejanggalan dalam daftar pemilih. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap integritas data pemilih, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam memastikan hak pilihnya terjamin.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Data pemilih yang akurat adalah kunci utama bagi terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Karena itu, Bawaslu Lampung berkomitmen memperkuat pengawasan di setiap tahapan, terutama pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” ujar Iskardo.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan.



“Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk turut serta mengawasi proses pembaruan data pemilih. Jika ada temuan atau dugaan ketidaksesuaian data, segera laporkan ke posko pengaduan Bawaslu terdekat. Pengawasan bukan hanya tugas lembaga, tetapi tanggung jawab bersama demi menjaga kedaulatan suara rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskardo menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. “Kami juga terus menjalin kerja sama dengan KPU, Disdukcapil, aparat keamanan, dan berbagai pihak lain untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilih atau justru terdaftar lebih dari satu kali. Pencegahan dini menjadi langkah utama kami dalam memastikan daftar pemilih yang bersih dan akuntabel,” tutupnya.

KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.

Narahubung
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung